

Policy Article

# Menjembatani Kesenjangan: Memperkuat Perlindungan Sosial Adaptif bagi “Kelas Menengah yang Hilang” di Indonesia

RDI Policy Brief No. 2 (ASP) 20250120

*Dyah Larasati<sup>1</sup>, Eri Krismiyaningsih<sup>2</sup>,  
Latika Putri Barliani<sup>3</sup>, Debby Paramitasari<sup>4</sup>*

1. Resilience Development Initiative, Research Fellow & Social Policy Expert
2. Resilience Development Initiative, Programme Manager
3. Resilience Development Initiative, Research officer
4. Resilience Development Initiative, Programme Officer

4

## Ringkasan

Indonesia menghadapi tantangan sosial dan ekonomi yang unik dan saling terkait yang berasal dari tingginya tingkat informalitas, tren penuaan yang cepat, dan tingginya kerentanan terhadap bencana alam. Tantangan-tantangan ini secara disproporsional berdampak pada kelompok demografis kritis—disebut sebagai “kelas menengah yang hilang”—sebuah kelompok yang kerap terabaikan dalam kerangka perlindungan sosial tradisional. Mengatasi kebutuhan mereka melalui sistem Perlindungan Sosial Adaptif (PSA) sangat penting untuk memastikan stabilitas ekonomi, meningkatkan mobilitas/produktivitas, dan ketahanan terhadap guncangan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Sosial Adaptif (PSA); Kelas Menengah; Kerentanan; Manajemen Risiko Bencana; Mobilitas Ekonomi; Ketimpangan Gender

### Memahami “Kelas Menengah yang Hilang” di Indonesia

Berdasarkan rumusan definisi Bank Dunia, kelas menengah di Indonesia mencakup individu dengan pendapatan antara Rp1,2 juta hingga Rp 6 juta per bulan, atau setara dengan Rp 14,4 juta hingga Rp 72 juta per tahun. Sementara itu, kelas menengah

bawah terdiri dari masyarakat yang berpenghasilan Rp 532.000 hingga Rp 1,2 juta per bulan, atau Rp 6,38 juta hingga Rp14,4 juta per tahun. Kelas menengah umumnya ditandai oleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi, pekerjaan yang stabil, serta status ekonomi yang berada di antara kemiskinan dan kekayaan. Kelompok ini memainkan peran krusial dalam

perekonomian nasional, menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi domestik yang tinggi. Kekuatan kelas menengah menciptakan basis konsumsi yang stabil, yang pada gilirannya mendorong investasi lebih produktif dan memperkuat pertumbuhan berbagai sektor ekonomi dan sosial. Berdasarkan komposisi produk domestik bruto (PDB), konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari setengah PDB Indonesia, menunjukkan besarnya kontribusi kelompok ini. Selain itu, dengan jumlah populasi signifikan dan sebagai pembayar pajak utama, kelas menengah memberikan sumbangan pajak terbesar dibandingkan kelas ekonomi atas dan bawah, memperkuat basis penerimaan negara.

**Pada tahun 2024, kelas menengah Indonesia hanya berjumlah 17 persen dari total populasi, atau sekitar 48 juta orang, sementara 49 persen lainnya masih menjadi bagian dari “calon kelas menengah” – bagian populasi penduduk yang sangat rentan jatuh ke dalam kemiskinan<sup>1</sup>. Sisanya berada pada kelompok**

rentan/berisiko miskin (24 persen) dan hidup di bawah garis kemiskinan (9 persen). Kondisi ini menunjukkan tren penurunan yang mengkhawatirkan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, kelas menengah Indonesia mencapai 21,45 persen dari populasi, namun angka ini turun menjadi 17,13 persen pada 2024. Sementara itu, persentase masyarakat miskin sedikit berkurang hingga 0,37 persen dari 9,41 persen pada 2019 menjadi 9,04 persen pada 2024. Di sisi lain, kelompok masyarakat rentan miskin meningkat tajam, dari 20,56 persen pada 2019 menjadi 24,23 persen pada 2024. Adapun kelompok calon kelas menengah juga mengalami sedikit peningkatan dari 48,20 persen pada 2019 menjadi 49,22 persen pada 2024 (lihat **Tabel 1**). Data ini mencerminkan kemunduran stabilitas ekonomi masyarakat, meningkatnya kerentanan ekonomi, dan melemahnya taraf kesejahteraan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan perlindungan sosial untuk mendukung calon kelas menengah dan kelompok rentan, sekaligus mempertahankan serta memperluas kelas menengah yang mapan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

**Tabel 1. Populasi Indonesia berdasarkan Kelas Pengeluaran pada tahun 2019 dan 2024**

No.	Kategori	Pengeluaran per Bulan per Kapita	2019 (juta orang)	2019 (%)	2024 (Juta Orang)	2024 (%)
1.	Kelas Atas	>Rp9,904,844	1.02	0.38	1.07	0.38
2.	Kelas Menengah	Rp2,040,262 – Rp9,909,844	57.33	21.45	47.85	17.13
3.	Menuju Kelas Menengah	Rp874,398 – Rp2,040,262	128.85	48.20	137.50	49.22
4.	Rentan Miskin	Rp582,932 – Rp874,398	54.97	20.56	67.69	24.23
5.	Miskin	<Rp582,932	25.14	9.41	25.22	9.04
<b>Total Populasi</b>			<b>267,28</b>		<b>279,33</b>	

Sumber:

- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240828135227-4-567097/bps-948-juta-warga-kelas-menengah-ri-turun-kelas-gara-gara-pandemi>
- [https://www.instagram.com/databoks.id/p/C\\_Scr70y0a3/?img\\_index=1](https://www.instagram.com/databoks.id/p/C_Scr70y0a3/?img_index=1)

<sup>1</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240828135227-4-567097/bps-948-juta-warga-kelas-menengah-ri-turun-kelas-gara-gara-pandemi>

Tabel 2. Kelas Menengah Indonesia Berdasarkan Generasi pada Tahun 2024

No.	Generasi	Tahun Kelahiran	Total Jumlah (Individu)	%
1.	Pre-Boomers	Sebelum 1946	536 ribu	1.12
2.	Boomers	1946 - 1964	6.1 juta	12.62
3.	Generasi X	1965 - 1980	11.85 juta	24.77
4.	Millennial/Generasi Y	1981 - 1996	11.77 juta	24.6
5.	Generasi Z	1997 - 2012	11.54 juta	24.12
6.	Generasi Alpha	2013 - 2024	6.1 juta	12.77
TOTAL MIDDLE CLASS			47.85 juta	

Sumber: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240830190043-4-567915/siapa-saja-kelas-menengah-di-indonesia-ini>

Berdasarkan karakteristik generasional, kelas menengah didominasi oleh Generasi X sebesar 24,7 persen, diikuti oleh Generasi Milenial (Generasi Y) sebesar 24,6 persen, Generasi Z sebesar 24,23 persen, serta sisanya merupakan generasi boomers 12,62 persen dan pre-boomers 1,12 persen (lihat Tabel 2). Data ini menunjukkan bahwa kelompok kelas menengah tersebar secara merata di ketiga generasi ini. Distribusi kelas menengah tersebut menyoroti beragamnya kebutuhan tiap kelompok dan menggarisbawahi pentingnya merancang kebijakan yang sesuai dengan variasi tahapan kehidupan mereka sehingga diperlukan rancangan kebijakan yang lintas generasi yang inklusif. Bagi Gen X, yang tengah mendekati masa pensiun, keamanan finansial dan perencanaan pensiun harus diprioritaskan. Bagi generasi Milenial dan Gen Z, yang keduanya masih berada pada tahapan awal karier, kebijakan harus berfokus pada pengembangan keterampilan dan pengembangan karier untuk memastikan kesiapan mereka untuk berkembang di pasar kerja yang terus berkembang dan mempersiapkan masa tuanya.

**Kerentanan ekonomi yang dihadapi oleh populasi kelas menengah, terutama calon kelas menengah, merupakan isu yang tidak dapat diabaikan. Guncangan**

**eksternal seperti bencana, inflasi, dan kemerosotan ekonomi berpotensi mendorong kelompok ini kembali ke jurang kemiskinan.** Beban ekonomi yang dirasakan kelas menengah semakin berat sebab peran mereka sebagai tulang punggung pendapatan pajak negara. Berbagai kebijakan baru, seperti kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN), pembatasan subsidi bahan bakar minyak (BBM), pajak karbon, asuransi kendaraan wajib, dan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), semakin menekan daya beli kelompok ini. Kondisi ini mencerminkan rapuhnya keuangan sebagian besar masyarakat dan menyoroti kebutuhan mendesak akan sistem perlindungan sosial yang lebih kuat.

**Oleh karena itu, kebijakan yang ada maupun yang akan dirancang harus dapat berperan untuk membantu masyarakat menghadapi tekanan pengeluaran yang besar, mengelola guncangan langsung, serta menangani ketidakpastian jangka panjang.** Tanpa upaya yang memadai untuk melindungi kelompok yang berperan krusial bagi perekonomian nasional ini, peluang untuk meningkatkan mobilitas sosial dan produktivitas akan tetap rapuh. Lebih jauh, stabilitas ekonomi Indonesia berisiko terganggu. Oleh karena itu, penguatan

perlindungan sosial yang inklusif dan berorientasi jangka panjang sangat penting untuk memastikan kelas menengah, khususnya calon kelas menengah, mampu bertahan dan berkontribusi optimal terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

### **Peta Perlindungan Sosial di Indonesia: Kekuatan dan Tantangan**

**Indonesia telah mencapai kemajuan signifikan dalam memperkuat sistem perlindungan sosialnya.** Program-program utama seperti Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Sembako telah memberikan dukungan penting kepada jutaan penduduk di rumah tangga berpendapatan rendah, sehingga membantu mengurangi kemiskinan selama beberapa dekade terakhir. Program-program ini, dilengkapi dengan perbaikan secara terus menerus dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)- yang saat ini tengah berproses menuju Satu Data Tunggal, Data Registrasi Sosial dan Ekonomi- yang mengidentifikasi dan memprioritaskan lebih dari 100 juta masyarakat berpenghasilan rendah dan menjadi tulang punggung upaya penyaluran bantuan bersasaran Indonesia. Selain itu, Indonesia juga terus mengembangkan sistem pembayaran digital dan meningkatkan inklusi finansial yang memfasilitasi rumah tangga miskin dan rentan demi terwujudnya penyaluran bantuan melalui transfer tunai yang efisien, terutama selama bencana atau situasi darurat lainnya.

**Terlepas dari kekuatan-kekuatan tersebut, masih terdapat tantangan besar dalam sistem perlindungan sosial yang masih perlu diatasi.** Salah satu tantangan utama adalah terbatasnya cakupan perlindungan sosial bagi pekerja di sektor informal, yang mencakup 59 persen angkatan kerja di Indonesia. Banyak dari para pekerja ini, terutama perempuan, belum memiliki akses pada skema perlindungan sosial formal seperti jaminan sosial ketenagakerjaan

termasuk jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Lebih lanjut, perempuan menghadapi kerugian tambahan, yakni memiliki penghasilan 22 persen lebih rendah dibandingkan laki-laki dan kurang terwakili dalam program jaminan sosial (Sakernas, Februari 2024).

**Selain itu, sistem perlindungan sosial yang ada saat ini sebagian besar diarahkan untuk mengatasi kemiskinan kronis dan belum cukup siap untuk merespons guncangan yang terjadi secara tiba-tiba, seperti bencana dan dampak perubahan iklim yang terjadi secara perlahan (*slow-onset*).** Indonesia sangat rentan terhadap perubahan iklim, dengan kenaikan permukaan air laut dan kejadian cuaca ekstrem yang mengancam mata pencaharian penduduk, khususnya di wilayah pesisir dan pedesaan. Sayangnya, langkah-langkah adaptasi bencana dan perubahan iklim jangka panjang belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam kerangka perlindungan sosial. Saat ini, manajemen bencana dan perubahan iklim di Indonesia lebih banyak berfokus pada dampak jangka pendek, yang tetap penting untuk menyelamatkan nyawa dan menyediakan jaring pengaman (*safety nets*) bagi individu dan keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar akibat bencana. Namun, perhatian yang lebih besar diperlukan untuk menangani dampak jangka panjang, seperti hilangnya mata pencaharian akibat bencana. Jaring pengaman sosial seharusnya tidak hanya memberikan bantuan sementara, tetapi juga berperan dalam memberdayakan masyarakat untuk memulihkan dan meningkatkan kondisi ekonomi mereka pascabencana, sehingga keberlanjutan hidup dan kesejahteraan mereka lebih terjamin.

### **Pentingnya Perlindungan Sosial Adaptif di Indonesia**

Untuk mengatasi tantangan ini, Indonesia telah mengadopsi pendekatan Perlindungan

Sosial Adaptif (PSA) sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). PSA menggabungkan program perlindungan sosial tradisional dengan manajemen risiko bencana dan strategi adaptasi iklim, sehingga menciptakan sistem yang fleksibel dan dinamis yang dapat merespons kerentanan negara yang kompleks. Adopsi PSA sangat penting bagi Indonesia karena beberapa alasan:

1. **Bencana:** Indonesia sangat rentan terhadap berbagai jenis bencana, baik yang disebabkan oleh ancaman alam, manusia, maupun teknologi. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami lebih dari 3.000 kejadian bencana antara tahun 2000 dan 2020. Sistem PSA dapat memberikan respons yang lebih tepat waktu dan terukur terhadap guncangan yang sering terjadi, memastikan bahwa bantuan menjangkau mereka yang paling membutuhkan ketika bencana terjadi.
2. **Perubahan Iklim:** Seiring dengan terus meningkatnya dampak perubahan iklim, Indonesia harus mengintegrasikan strategi jangka panjang, seperti diversifikasi mata pencaharian dan perlindungan wilayah pesisir, ke dalam sistem perlindungan sosialnya. Langkah-langkah ini akan membantu populasi rentan beradaptasi dengan dampak peristiwa cuaca ekstrem.
3. **Guncangan Ekonomi:** Sistem PSA diharapkan mampu beradaptasi dengan lebih baik terhadap fluktuasi perekonomian, termasuk inflasi, kehilangan pekerjaan, dan ketidakstabilan makroekonomi lainnya, agar dapat melindungi masyarakat rentan agar tidak jatuh lebih dalam ke dalam kemiskinan. Ini juga termasuk melindungi masyarakat dari krisis ekonomi yang timbul akibat bencana.

## Menata Ulang Masa Depan Indonesia: Mendorong Perubahan Kebijakan untuk Memperkuat Resiliensi dan Inklusivitas

Kompleksnya lanskap ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh Indonesia menggarisbawahi peran penting penduduk kelas menengah, bersama dengan calon kelas menengah, dalam mempertahankan pertumbuhan dan resiliensi ekonomi. Namun, kelompok kritis ini masih sangat rentan terhadap tekanan kenaikan biaya hidup, kurangnya keamanan finansial, dan terbatasnya kesempatan untuk mobilitas dan produktivitas. Saat ini sangat penting untuk meninjau kembali pendekatan kebijakan yang telah ada dan menciptakan kerangka kerja yang lebih kokoh yang tidak hanya mendukung kelas menengah namun juga memberdayakan penduduk yang tengah berupaya memasuki kelas menengah.

### Memperkuat Kelas Menengah dan Calon Kelas Menengah

Untuk membentengi kelas menengah dan calon kelas menengah, Indonesia harus memastikan aksesibilitas kebutuhan mendasar untuk melindungi stabilitas keuangan mereka. Memperluas akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan perumahan yang terjangkau sangat penting untuk mengurangi tekanan keuangan yang sering kali mendorong individu dan keluarga ke dalam krisis ekonomi. Tanpa dukungan yang demikian, aspirasi untuk meningkatkan mobilitas dan produktivitas yang lebih besar akan sulit dijangkau oleh banyak orang.

Selain itu, pemberian insentif pajak bersasaran dapat mulai diperkenalkan untuk memberikan dukungan keuangan yang dibutuhkan kelompok berpenghasilan menengah untuk berkembang. Kebijakan ini akan membantu mendorong stabilitas keuangan yang lebih baik, sehingga memungkinkan keluarga berinvestasi untuk masa depan mereka. Pada

saat yang sama, penting untuk memprioritaskan peluang pengembangan karir dan program pengembangan keterampilan, khususnya bagi generasi Milenial dan Gen Z. Dengan membekali generasi muda dengan keterampilan yang dibutuhkan agar unggul dalam pasar kerja yang terus berkembang, Indonesia dapat memastikan bahwa mereka tidak hanya sejahtera namun juga memberikan kontribusi yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Bagi kelas menengah dari generasi X, akses yang memadai terhadap jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan menjadi kebutuhan mendasar untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama di tengah situasi krisis dan dalam menghadapi masa tua mereka. Dalam kondisi bencana, skema penyaluran bantuan sosial perlu secara strategis memprioritaskan kelompok ini guna mencegah keterpurukan ekonomi keluarga mereka. Sementara itu, untuk generasi Boomers dan Pre-Boomers, perlindungan sosial melalui tunjangan pensiun yang memadai serta kemudahan akses terhadap fasilitas kesehatan berkualitas menjadi aspek yang sangat penting. Memastikan terpenuhinya kebutuhan ini tidak hanya mendukung kesejahteraan individu dari kelompok tersebut, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

### Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial

**Salah satu kesenjangan yang paling mendesak dalam lanskap kebijakan perlindungan sosial Indonesia saat ini adalah belum disertakannya sebagian besar kelompok produktif/angkatan kerja rentan, terutama mereka yang bekerja di sektor informal ke dalam jaminan sosial ketenagakerjaan.** Dengan 59 persen penduduk yang bekerja di sektor informal, terbatasnya akses terhadap program jaminan sosial dasar seperti jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama dana pensiun, membuat jutaan orang rentan mengalami

kemiskinan dan guncangan ekonomi. Selain itu, strategi meningkatkan kapasitas pekerja informal melalui program pendidikan dan pelatihan keterampilan sangat diperlukan untuk mendukung mobilitas sosial dan ekonomi mereka. Sangat penting untuk memprioritaskan keikutsertaan pekerja informal dalam program-program penting ini, untuk memastikan bahwa mereka tidak tertinggal seiring kemajuan negara.

Selain itu, sistem perlindungan sosial Indonesia harus adaptif—mampu merespons guncangan ekonomi dan krisis terkait perubahan iklim dengan lebih baik. Investasi pada jaring pengaman adaptif bukanlah suatu pilihan; dan membangun ketahanan bagi kelompok yang paling rentan adalah suatu keharusan. Pengembangan sistem PSA harus cukup fleksibel untuk menyerap dan merespons krisis yang terjadi secara tiba-tiba, memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang terjerumus ke lembah kerentanan maupun kemiskinan lebih dalam saat bencana terjadi. Program-program yang telah ada, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), PENA (Pahlawan Ekonomi Nusantara), Sembako, maupun asuransi mata pencaharian, harus dilengkapi dengan skema penyaluran yang lebih responsif dan aksesibilitas yang lebih luas bagi masyarakat terdampak. Langkah ini penting untuk membantu keluarga tetap mempertahankan kesejahteraan mereka selama masa krisis, sekaligus memperkuat fondasi perlindungan sosial yang inklusif dan tangguh.

### Membangun Resiliensi Melalui Sistem yang Adaptif

**Kerentanan Indonesia terhadap bencana alam dan perubahan iklim tidak dapat disangkal.** Menurut BNPB, pada tahun 2024, terdapat 2.107 bencana yang melanda Indonesia, dengan Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat menjadi wilayah yang paling sering terdampak. Kelompok masyarakat rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia, kepala keluarga perempuan, dan anak-anak

memerlukan perhatian khusus. Namun, sistem yang ada saat ini belum mampu menangani seluruh tantangan ini. Untuk dapat benar-benar melindungi masyarakat, manajemen risiko bencana harus diintegrasikan sepenuhnya ke dalam skema perlindungan sosial yang ada. Kemampuan untuk memberikan bantuan secara tepat waktu selama krisis akan bergantung pada seberapa efektif Indonesia menggabungkan program sosial dengan mekanisme tanggap bencana.

**Yang tidak kalah penting adalah perlunya peningkatan integrasi dan kualitas data pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).** Hal ini akan sangat meningkatkan kapasitas negara dalam merespons krisis, terutama di wilayah terdampak bencana dimana kelompok masyarakat rentan sering kali menghadapi risiko terbesar. Dengan meningkatkan daya tanggap terhadap guncangan pada sistem yang ada, Indonesia akan dapat menciptakan jaring pengaman yang tidak hanya reaktif namun juga proaktif dalam menjaga kehidupan dan penghidupan. Didukung dengan strategi adaptasi perubahan iklim yang telah berjalan selama 13 tahun sejak tahun 2012, Program Kampung Iklim (Proklam) telah dilaksanakan secara konsisten sebagai upaya konkret masyarakat lokal dalam mewujudkan pembangunan rendah karbon dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

## Mengatasi Ketimpangan Gender

**Berdasarkan Global Gender Gap Report 2024 oleh World Economic Forum (WEF), Indonesia menempati peringkat ke-100 dari 146 negara di dunia<sup>2</sup>.** Pada tahun 2023, Indonesia juga mencatat skor Indeks Ketimpangan Gender (IKG) sebesar 0,447. Perempuan Indonesia menghadapi kesenjangan pada berbagai dimensi, seperti penduduk dengan Pendidikan SMA ke atas

(kesenjangan sebesar 5.02 persen dibandingkan laki-laki), tingkat partisipasi angkatan kerja (kesenjangan sebesar 29.74 persen dibandingkan laki-laki) dan kesenjangan upah (kesenjangan sebesar 22 persen dibandingkan laki-laki). Karena hal tersebut, perempuan merupakan kelompok yang terkena dampak signifikan terhadap ketidak-amanan ekonomi. Kesenjangan ini membatasi kemampuan perempuan untuk mengakumulasi aset, merencanakan masa pensiun, mengamankan masa depan keluarga, rentan terhadap pemutusan hubungan kerja yang mengakibatkan perempuan kehilangan mata pencaharian, dan rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga serta harus memikul beban ganda dalam rumah tangga. Berdasarkan kondisi tersebut, menghapuskan kesenjangan upah antar gender dan mendorong kebijakan ketenagakerjaan yang adil harus menjadi prioritas utama dalam inisiatif kebijakan Indonesia.

**Reformasi kebijakan harus berfokus pada upaya meminimalisir ketidaksetaraan dan ketidakadilan terhadap perempuan di seluruh lini, termasuk pendidikan, partisipasi angkatan kerja, upah, serta kehidupan keluarga dan masyarakat. Refomasi tersebut akan mendorong lingkungan sosial dan ekonomi yang lebih inklusif dan adil bagi perempuan.** Salah satu isu penting yang perlu diperhatikan adalah inkonsistensi pemberian hak curi melahirkan di Indonesia. Hal ini sangat berkaitan dengan kepatuhan para pelaku usaha terhadap peraturan yang ada dan juga lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan hak pekerja perempuan tersebut. Pelaksanaan cuti maternitas ini menjadi penting sebagai salah satu upaya untuk mengurangi kerentanan dan memberikan pengaman pada perempuan untuk tetap memperoleh penghasilan saat merawat anak yang baru lahir<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> WEF (2024). Global Gender Gap 2024: Insight Report. June 2024. [https://www3.weforum.org/docs/WEF\\_GGGR\\_2024.pdf](https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2024.pdf)

<sup>3</sup> Setyonaluri, D., & Milawati, R. S. (2023). Mendorong Kesejahteraan Perempuan: Menjamin Cuti Maternitas melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. *Jurnal Perempuan*, 28(3), 189-203.

Selain itu, Indonesia perlu memprioritaskan peningkatan cakupan jaminan sosial bagi perempuan, yang kurang terwakili dalam sistem atau skema yang ada. Perlindungan sosial perlu memasukkan kondisi maternitas perempuan, khususnya bagi kelompok yang rentan seperti perempuan kepala keluarga, perempuan lansia, dan perempuan hamil dan menyusui. Contohnya, kepesertaan perempuan yang menikah dan mengasuh anak lebih rendah dibandingkan laki-laki dengan kondisi yang sama pada jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). Hal ini tentu saja akan membuat perempuan menjadi rentan dan meningkatkan risiko pekerjaan mereka. Memperluas akses dan memberikan insentif terhadap dana pensiun dan jaminan hari tua bagi perempuan, khususnya mereka yang bekerja di sektor informal, merupakan hal yang penting untuk mengatasi kesenjangan sistemik yang telah lama menjadi hambatan bagi keamanan ekonomi mereka.

### Kebijakan yang Inklusif Antar Generasi

Masa depan Indonesia terletak di tangan generasi mudanya. Namun, sistem yang ada saat ini tidak cukup mendukung pertumbuhan dan stabilitas sosial ekonomi mereka. Bagi Generasi X, yang tengah mendekati usia pensiun, menawarkan perencanaan pensiun dan langkah-langkah keamanan finansial adalah penting untuk memastikan mereka tidak mengalami kerentanan finansial seiring dengan bertambahnya usia. Akses jaminan hari tua dan jaminan pensiun perlu dimiliki oleh Generasi X. Bagi generasi Milenial dan Gen Z, yang masih berada dalam masa pertumbuhan karir mereka, pemerintah harus menciptakan peluang untuk pengembangan keterampilan dan pengembangan karir untuk memastikan mereka siap menghadapi pasar kerja yang berubah dengan cepat. Ini juga termasuk memberikan program keringanan pajak, subsidi perumahan, dan akses pada jaminan

kesehatan maupun jaminan ketenagakerjaan yang dapat membantu memperkuat kondisi finansial generasi ini. Sementara itu, bagi generasi lanjut usia, penyediaan akses terhadap fasilitas kesehatan dan jaminan pensiun akan membantu keberlangsungan hidup mereka di hari tua. Menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan unik setiap generasi—memberikan keamanan finansial bagi mereka yang mendekati masa pensiun dan peluang karier bagi pekerja muda—adalah kunci untuk mempertahankan kelas menengah yang berkelanjutan dan tangguh.

### Pemikiran Akhir: Beralih dari Pendekatan Konvensional

Indonesia berada di persimpangan jalan, dimana tantangan berupa ketidakstabilan ekonomi, meningkatnya kesenjangan, dan kerentanan iklim memerlukan kebijakan inklusif yang melampaui pendekatan konvensional. Dengan memperkuat kelas menengah, memperluas cakupan perlindungan sosial, mengintegrasikan sistem adaptif, dan mengatasi ketidaksetaraan gender, Indonesia dapat menciptakan masa depan yang tidak hanya melindungi namun juga memberdayakan kelompok masyarakat paling rentannya. Melalui upaya komprehensif ini, negara ini dapat membangun masyarakat yang lebih tangguh, inklusif, dan adil, dimana peluang ekonomi dan keamanan dapat dijangkau oleh semua orang.